

PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM REVITALISASI DAN REINTERPRETASI NILAI-NILAI PANCASILA

Sumaryati

ABSTRAK

Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia belum selesai diaplikasikan, bahkan selalu dalam proses yang berlangsung terus menerus. Dalam penerapannya sebagai dasar Negara tersebut, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya sebagai dasar Negara dengan realitasnya sebagai dasar Negara. Salah satu sebab mendasar mengapa Pancasila sebagai dasar Negara belum teraplikasi secara maksimal adalah belum dipahaminya secara benar kelima nilai dasar Pancasila oleh masyarakat Indonesia dan juga pemimpin . Masyarakat Indonesia masih dalam taraf memiliki pengetahuan tentang Pancasila, belum memiliki ilmu tentang pancasila. Hal ini terbukti dengan kemampuan masyarakat menjelaskan tentang Pancasila secara dangkal, bahkan terkesan hafal saja, serta belum mempunya masyarakat atau pemimpin bangsa ini menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berpisau nilai-nilai Pancasila. Realitas semakin gencarnya globalisasi dan era perang multidimensi, menuntut bangsa ini memiliki ketahanan mental ideologis yang kuat. Apabila tidak , eksistensi bangsa dapat terancam. Inilah urgensi revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila di masa sekarang dan masa mendatang

.Upaya revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila tersebut antara lain melalui kajian Pancasila secara rasional ilmiah dalam semua jenjang pendidikan. Kajian tentang Pancasila tersebut secara formal harus dikemas dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, yaitu Pendidikan Pancasila. Walaupun diakui bahwa dalam Pendidikan Pancasila masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, namun harus diakui juga bahwa Pendidikan Pancasila memiliki peran cukup strategis dalam merevitalisasi dan mereinterpretasi nilai-nilai Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila akan terwariskan dan dikembangkan secara teratur, sistematis, dan ilmiah, karakter kebangsaan akan tertanam, dan wawasan-wawasan segar dan baru tentang pengembangan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology akan terlahir, sehingga nilai-nilai Pancasila akan mampu real dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar Pendidikan Pancasila dapat berperan secara optimal dalam merevitalisasi dan mereinterpretasi nilai-nilai Pancasila tersebut, maka Pendidikan Pancasila harus mendapatkan tempat, media, dan dukungan dalam system pendidikan nasional Indonesia, diiringi dengan pemberdayaan instansi-instansi terkait dengan pendidikan Pancasila, perubahan metode pembelajaran Pancasila (semula dogmatis, berubah menjadi rasional ilmiah, dari teacher center ke student center)), pelatihan metode pembelajaran nilai-nilai Pancasila, dan pelatihan membuat media pembelajaran Pancasila .

A. PENGANTAR

Dalam hampir satu setengah dasawarsa ini, bangsa ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan serius, termasuk dalam bidang pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan nasional semakin mendapatkan tantangan dan hambatan dalam proses perwujudannya. Pengaruh media telekomunikasi (hand phone, face book, internet ,televise, game), pengaruh perdagangan bebas atau perdagangan melalui dunia maya (SIM CARD,ATM,dsb) yang menyebabkan semakin menipisnya komunikasi antara yang membutuhkan dan yang mampu memenuhi kebutuhan, sehingga berakibat pada suatu kenyataan harus menerima , serta pengaruh transportasi yang menyebabkan jarak dan waktu dapat ditembus dengan cepat, Semua itu sangat ampuh dan cepat mengaburkan bahkan menghilangkan nilai-nilai yang telah ditanamkan dan ditumbuhkan melalui pendidikan, baik pendidikan formal (sekolah), maupun pendidikan non-formal (keluarga). Akibat selanjutnya pendidikan dikatakan tidak mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, serta kemudian dijadikan kambing hitam bagi terjadinya berbagai hal yang merugikan bangsa ini.

Sedangkan dalam kehidupan social kemasyarakatan, masyarakat madani yang ingin dicapai dirasakan semakin jauh dari idealisme yang diinginkan. Warga masyarakat semakin mudah marah dan geram, serta melakukan berbagai tindakan yang anarkhis yang akibatnya justru merugikan masyarakat sendiri. Masyarakat menjadi warga yang konsumtif dan selalu ingin melakukan dengan cepat,mudah, serba instan, untuk mewujudkan keinginannya. Norma dan aturan seolah hanya tulisan-tulisan yang tanpa makna, norma dan aturan tidak lagi dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah materi dan kedudukan, serta hal-hal praktis yang dapat membuat enakny hidup. Selanjutnya tanpa malu dan perasaan melakukan hal-hal yang menyimpang, yang merugikan banyak orang Nilai-nilai yang semestinya menjadi pedoman dan panutan dalam kehidupan perseorangan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hampir tenggelam, tak bermakna lagi.

Selain itu eksistensi dan keberlangsungan bangsa ini juga sangat tergantung pada sikapnya terhadap pengaruh globalisasi yang semakin berkembang dan menantang. Globalisasi harus disikapi secara positif sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi sehingga semakin mengangkat eksistensi bangsa di antara bangsa lain. Globalisasi memang diperuntukkan untuk bangsa yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam berbagai dimensinya, terlebih dimensi ideology, ekonomi, politik, dan pendidikan. Saatnya bagi semua komponen bangsa ini untuk segera memperkuat dan memperkokoh ideology, politik, ekonomi, dan pendidikan, untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi. Basis dasar untuk memperkuat dan memperkokoh semua itu adalah pendidikan

Dengan demikian negara yang besar dan kokoh memerlukan dasar dan landasan filosofis yang kokoh juga. Keinginan bangsa ini jelas, ingin menjadi Negara yang besar dan kokoh, karena itu merupakan suatu keharusan bahwa dasar dan landasan filosofisnya harus kuat. Tidak dapat ditawar lagi, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Dengan demikian merupakan suatu keharusan juga bangsa ini untuk semakin memperkuat Pancasila sebagai dasar dan landasan filosofis bangsa ini. Pendidikan, politik, ekonomi, dan ideology, serta semua aspek berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus bernuansa nilai-nilai Pancasila. Terbukti sudah Pancasila-lah yang mampu mengatasi semua perbedaan dan kemajemukan bangsa ini. Perbedaan dan kemajemukan bangsa ini tidak harus dihilangkan tetapi justru harus dikembangkan.

Pancasila sebagai dasar Negara merupakan "ought to", untuk keberlangsungan bangsa dan Negara Indonesia, yang berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi pilar dalam menjalankan semua aspek kehidupan kenegaraan. Namun secara ironis dan tidak disadari atau setengah disadari, nilai-nilai Pancasila semakin disingkirkan, semakin dipandang sebelah mata, dan akan semakin parah lagi, jika Pancasila tidak lagi dikenal oleh bangsa ini. Nilai-nilai luhur bangsa yang melandasi eksistensi Negara Indonesia telah dilalaikan

oleh banyak pihak. Pancasila nampak kehilangan relevansinya untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan perundang-undangan, serta dalam penyelesaian masalah nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila

Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Istilah lain revitalisasi adalah revalidasi, yang berarti mengembalikan proses yang benar. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbegara. Sedangkan reinterpretasi berarti menafsirkan kembali nilai-nilai Pancasila, artinya meluruskan kembali terhadap berbagai penafsiran yang keliru tentang Pancasila. Terdapat berbagai alasan mengapa revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan. Alasan tersebut antara lain adalah pertama, Pancasila merupakan ideology terbuka, yang berarti nilai-nilai Pancasila harus selalu dikembangkan, dikaji, dan di update agar selalu mampu sesuai dengan perubahan dan kemajuan peradaban dan pemikiran manusia, dengan tanpa merubah konsep-konsep dasarnya. Alasan kedua adalah adanya kenyataan upaya mendeskritkan nilai-nilai Pancasila oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terjadinya berbagai kegagalan dan musibah dalam Negara ini, dinyatakan sebagai kesalahan bangsa ini memilih landasan filosofis. Pancasila dijadikan tumpuan kesalahan, yang sebenarnya hal tersebut adalah kesalahan manusianya, dalam hal ini oknum penyelenggara Negara. Alasan ketiga, adanya kenyataan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang formalistic belaka, Pancasila difahami hanya dari luarnya, "kulit"nya saja, sehingga berakibat pada pemahaman yang salah, karena Pancasila hanya dihafalkan saja tanpa diiringi dengan proses pengambilan makna. Alasan keempat, adanya arus globalisasi dan transformasi, serta perang era multi dimensi yang sangat kuat, yang dapat mempengaruhi jati diri bangsa. Dalam kondisi globalisasi dan era perang multi

dimensi ini, ketahanan mental ideologis sangat diperlukan untuk menjaga dan memperkokoh eksistensi bangsa.

2. Media revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila disepakati bersama sebagai suatu komitmen moral bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dengan demikian merupakan kesadaran moral bangsa ini untuk selalu berdasarkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara universal nilai-nilai luhur yang disepakati sebagai komitmen moral bangsa Indonesia ini, kebenarannya juga diterima oleh semua bangsa dan Negara. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa manusia yang mengakui adanya Tuhan, manusia yang saling menghargai dan menghormati, keutuhan bangsa, musyawarah sebagai media solusi, dan terwujudnya keadilan social, tidak hanya bangsa Indonesia yang mengakui kebenarannya, tetapi juga bangsa lain. Sebagai falsafah Negara, Pancasila merupakan karunia dari Allah untuk bangsa Indonesia, dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan mengisi kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, serta yang utama sebagai dasar Negara RI. Jadi bangsa ini tidak perlu lagi memiliki rasa malu atau perasaan-perasaan lain terkait dengan penyebutan dan penggunaan Pancasila.

Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti nilai-nilai Pancasila merupakan “penciri” moralitas bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain. Juga dapat dinyatakan sebagai karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa atau penciri bangsa ini, tentu saja perlu dipertahankan, dikembangkan, dan dikaji. Dengan demikian jelas dibutuhkan adanya media untuk pengembangan dan pengkajian karakter bangsa tersebut. Media yang paling tepat untuk hal tersebut adalah pendidikan. Hal ini relevan dengan tekad pemerintah untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan

dan penumbuhkembangkan karakter positif bangsa tentang Pancasila. Untuk hal tersebut pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu (Lemhanas. 2010:17 – 18) :

Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila untuk mengembangkan seseorang , sehingga sanggup mengembangkan potensi yang berasal dari fitrah insane, dari Allah swt. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat.

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembangkan kemsbli karakter Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, tangguh, santun. Apabila karakter ini dapat dibangun , diperkuat maka bangsa ini akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan masa depan.

Ketiga', pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui pemantapan nilai nilai kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

Pertimbangan lain dipilihnya pendidikan sebagai media untuk merevitalisasi dan mereinterpretasi nilai-nilai Pancasila adalah bahwa pendidikan merupakan sarana utama bagi terlahirnya semua profesi dan pimpinan yang professional. Selain itu dalam pendidikan inilah tempat berkumpulnya anak-anak bangsa yang ke depan diharapkan dapat menerima estafet kepemimpinan bangsa ini secara bertanggung jawab. Dalam hal inilah pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan anak-anak bangsa yang

memiliki tanggungjawab pada bangsa dan negaranya, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban moral dalam pendidikan diberikan materi yang berkaitan dengan penempaan karakter kebangsaan ini, yaitu Pendidikan Pancasila.

Mengacu pada pemikiran Prof. Koento Wibisono, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang sadar dan terdidik. Generasi yang sadar adalah generasi yang hati nuraninya selalu terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai sesuatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Generasi yang terdidik adalah generasi yang memiliki kemandirian dan kemampuan dalam mengembangkan ilmunya sebagai sarana pengabdian demi bangsa dan negaranya. Pendidikan yang mampu mewujudkan generasi seperti tersebut di atas, adalah pendidikan yang memberikan bekal akademis, ketrampilan professional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan pada kaidah keilmuan (*matter of having*), serta pendidikan yang membentuk watak menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited dengan kepentingan bangsa (*matter of being*). Dengan demikian semakin jelas bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu secara nyata mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia secara seimbang, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

3. Keadaan Pendidikan Nasional Indonesia

Das-sollen pendidikan nasional Indonesia sangat memperhatikan dasar-dasar kepribadian, seperti disebutkan pada Undang-undang No.20 Tahun 2003, pasal 1, bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Selain itu dalam BAB II, pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional Indonesia berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,----, serta bertanggungjawab. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia sangat meletakkan pendidikan kepribadian dan pendidikan karakter sebagai sentral pendidikan nasional Indonesia. Namun das-sein / realitas pelaksanaan pendidikan nasional dewasa ini dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, tidak memberikan perhatian serius terhadap pendidikan kepribadian dan pendidikan karakter ini. Bahkan dalam berbagai kebijakan nampak mengabaikannya.

Kebijakan pendidikan dewasa ini nampak cenderung bersifat pragmatis, sehingga kurikulum yang berkaitan dengan mata kuliah / mata pelajaran tentang watak, moral, agama, nilai serta nasionalisme tidak mendapat tempat yang signifikan, bahkan terkesan diabaikan dan dikesampingkan. Hal ini terbukti pada kebijakan ujian nasional yang hanya meletakkan mata ujian yang berkaitan dengan keilmuan dasar Selain itu tanpa dimuatnya pendidikan Pancasila dalam system pendidikan nasional sekarang ini, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional bersifat bebas nilai (value free), artinya ilmu adalah bersifat rasional, empiris, dan memiliki aspek pragmatis. Hal ini berkonsekuensi pada pemikiran bahwa yang terpenting dalam pendidikan adalah mata pelajaran / mata kuliah yang memiliki kemanfaatan atau kegunaan secara praktis, sehingga mata pelajaran / mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan nilai yang membentuk karakter, kepribadian, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak memiliki manfaat praktis. Pendidikan terkesan hanya digunakan sebagai transfer of knowledge saja.

4. Peran strategis Pendidikan Pancasila dalam revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila

Merupakan suatu kenyataan dan kebenaran, bahwa terdapat gejala masyarakat dan generasi muda Indonesia cenderung semakin kurang memperhatikan, lupa, bahkan melecehkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini antara lain disebabkan oleh *pertama*, karena revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang terlambat mengikuti perubahan yang berlangsung sangat cepat, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi kurang aktual-kontekstual. *Kedua*, karena adanya inkonsistensi pada tataran nilai praksis, yaitu seringkali masyarakat melihat perilaku para penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat, guru yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai instrumental dan nilai dasar Pancasila. *Ketiga*, sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang akhir-akhir ini mengendur, bahkan di lembaga-lembaga pemerintah termasuk di lembaga pendidikan formal, yang secara fungsional ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila. Hal ini terjadi karena Pendidikan Pancasila tidak lagi secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Pancasila sangat tepat diwajibkan penyelenggaraannya di semua jenjang pendidikan formal, sebab dengan demikian proses internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara sistemik terhadap anak didik dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Naskah Akademik Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dan Model-model Pembelajaran Pancasila Tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. *Pertama*, Pendidikan Pancasila yang dilakukan terlalu focus ke pembinaan kognitif sehingga mengabaikan pembinaan afektif dan konatif. Padahal pembinaan afektif dan konatif itulah memupuk kepekaan social, rasa tanggungjawab, kemampuan bertindak untuk mewujudkan suatu tanggung jawab moral. *Kedua*, persoalan metodologi penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang lebih bersifat pengajaran, sehingga terfokus pada pembinaan kognitif. Padahal internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap anak didik itu melalui pendidikan Pancasila,

sehingga diperlukan metodologi *institutional building*. Ketiga, materi pendidikan Pancasila belum tersaji dengan baik dari pendekatan vertical dan horizontal. Pendekatan vertical membutuhkan pemikiran evaluative-integratif terhadap kurikulum dan silabus pendidikan Pancasila dalam seluruh jenjang pendidikan. Sementara pendekatan horizontal berkaitan dengan rumusan hubungan yang jelas antara pendidikan pancasila dengan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan sejarah perjuangan bangsa, agar tidak terjadi tumpang tindih materi. Sebaliknya pendidikan agama, kewarganegaraan, sejarah perjuangan bangsa, juga perlu dievaluasi sehingga dapat bersinergi dengan tujuan pendidikan Pancasila, sebagai sub sitem pendidikan nasional.

Pendidikan pancasila di perguruan tinggi khususnya, perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, sebab para penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan, dan organisasi social politik, organisasi keagamaan ke depan adalah para sarjana jebolan perguruan tinggi. Mereka adalah akademisis, intelektual muda yang dengan tempaan moral Pancasila yang benar, akan memiliki semangot untuk mewujudkan nilai praksis Pancasila. Konsistensi yang diperlihatkan mereka sebagai pemimpin adalah cara sosialisasi nilai-nilai pancasila paling efektif. Sebagai pemimpin mereka juga memiliki otoritas dan kemampuan intelektual untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara tepat, sebagai upaya responsive terhadap dinamika internal dan arus globalisasi yang terus bergulir.

Dasar-dasar pendidikan Pancasila adalah dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Rumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu Pancasila mengandung nilai-nilai dasar filsafat, merupakan jiwa bangsa, menjadi cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi.

Selanjutnya bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideology pemersatu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai pancasila dilakukan khususnya lewat pendidikan formal, karena melalui pendidikan butir nilai Pancasila dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya merupakan pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Dengan demikian semua perangkat perundang-undangan merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Jika semua rakyat taat asas pada nilai-nilai instrumental yang betul-betul merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada perilaku setiap warga. Oleh karena itu merupakan suatu kewajaran , bahkan keharusan jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tulang punggung bangsa ini.

Secara spesifik tujuan Pendidikan pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :

- a. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.
- b. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar pancasila kepada mahasiswa sebagai warga Negara, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.
- c. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi berbagai persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan melalui system pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUd1945.

- d. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai ketuhana, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal maupun eksternal.

Berdasarkan tujuan pendidikan Pancasila tersebut, maka jelas pendidikan Pancasila memiliki peran strategis untuk merevitalisasi dan menginterpretasi nilai-nilai Pancasila, agar semakin membumi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

5. Landasan Keilmuan Pendidikan Pancasila sebagai Media Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Pancasila

Terdapat tiga landasan keilmuan pengembangan Pancasila melalui Pendidikan Pancasila. *Pertama*; landasan ontologis, dari aspek ontologis, pendidikan Pancasila dapat memberikan pemahaman kehidupan kenegaraan dan ketatanegaraan Indonesia, mempertahankan kekokohan kehidupan Indonesia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, menopang ketangguhan daya saing bangsa di masa globalisasi, dan melandasi perwujudan Negara Indonesia yang maju dan bermartabat di mata dunia. *Kedua*, landasan epistemologis, berdasarkan aspek epistemologisnya, pendidikan Pancasila di perguruan Tinggi di samping mengandung proses transfer nilai-nilai Pancasila, juga merupakan proses merubah sikap dan perilaku mahasiswa. Oleh karena itu persoalan utama dalam Pendidikan pancasila adalah persoalan metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran pancasila mengacu pada sifat keilmuan Pendidikan pancasila itu sendiri yang lebih berorientasi pengembangan *soft skill* melalui sejumlah metode antara lain ceramah, diskusi, penugasan, resitasi, problem solving, seminar, simulasi. Penggunaan metode Pendidikan Pancasila berbasis metode *active learning* dan *problem based learning*, yang perlu didukung dengan alat peraga visual dan verbal. *Ketiga*, landasan aksiologis, dalam pasal 3 UU RI No.20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan pancasila memiliki komitmen normative-konstitusional , yaitu mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan Pancasila juga memiliki komitmen normative-derivatif , yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

6. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Agar pendidikan Pancasila mampu berperan maksimal dalam merevitalisasi dan mereinterpretasi nilai-nilai Pancasila, maka penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan Tinggi harus dipahami bukan sebagai kumpulan doktrin /ajaran tentang ideology, dasar Negara saja, namun juga sebagai fenomena sejarah yang dapat difahami melalui pendekatan dan konsep dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Dengan bahasa lain, penyelenggaraan pendidikan Pancasila harus diarahkan sebagai upaya untuk memupuk refleksi kritis dan rasional terhadap ideology, dasar Negara, dalam rangka mengembangkan gagasan alternative tentang lulusan perguruan tinggi yang berkepribadian Pancasila, sehingga harus diperhatikan visi, misi, kompetensi, substansi kajian, strategi pengembangan , metode, dan system evaluasi hasil pembelajaran pendidikan Pancasila.

C. KESIMPULAN

Merupakan suatu keharusan melakukan revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila, agar nilai-nilai Pancasila selalu mampu sesuai dengan perkembangan pemikiran dan peradaban bangsa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi. Melalui kajian Pancasila di lembaga pendidikan inilah nilai-nilai Pancasila akan semakin real dalam kehidupan dan wawasan-wawasan segar tentang Pancasila akan ditemukan, sekaligus karakter kebangsaan akan terwariskan kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional* : Jakarta
- Dirjen Dikti Depdiknas. 2010. *Naskah Akademik Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dan Model-model Pembelajaran Pancasila.*: Jakarta
- Koento Wibisono Siswomihardjo. 2010. *Pembudayaan Pancasila dalam Perspektif Urgensinya Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional*, makalah pada Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, yang diselenggarakan oleh Prodi PPKn FKIP UAD Yogyakarta
- Kaelan.2010. *Realitas Pendidikan Nasional Indonesia Tanpa Pendidikan Pancasila* , makalah pada Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, yang diselenggarakan oleh Prodi PPKn FKIP UAD Yogyakarta
- Kaelan. 2002, *Filsafat Pancasila* .Paradigma: Yogyakarta
- Kaelan. 2004.*Pendidikan Pancasila*. Paradigma.: Yogyakarta
- Lemhanas RI. 2010. *Urgensi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional*. Makalah pada Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, yang diselenggarakan oleh Prodi PPKn FKIP UAD Yogyakarta
- Malik Fajar. 2003. *Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila, tinjauan Dari Sudut Historis*, Makalah pada Seminar Nasional Kapasitas Pancasila Menghadapi Krisi Multi Dimensi , yang diselenggrakan oleh Lembaga pengkajian dan pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) : Yogyakarta

BIODATA PENULIS

Nama : Dra.Sumaryati,M.Hum
 NIP/NIK : 60910102
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 4 Juli 1967
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IV a / Pembina
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : Universitas Ahmad Dahlan
 Alamat : Kampus II UAD Jln Pramuka 42,Sidikan Yogyakarta 55161
 Telp./Faks. : (0274)371120,372915 Fax. (0274)450368
 Alamat Rumah : Boro 1,Karagsewu,Galur,Kulon Progo,Yogyakarta
 Telp./Faks. : 085 228 107 282
 Alamat e-mail : sumaryatim@yahoo.co.id
 Pendidikan : Pasca Sarjana UGM Ilmu Filsafat
 Karya tulis Ilmiah :

2002	Kontribusi Nilai Ungkapan Tradisional Jawa bagi Proses Reformasi Bangsa	Jurnal Novelty Vol 1, No.1
2005	Kontribusi Filsafat dalam Upaya Penegakan Hukum	Jurnal Novelty Vol.2, No.1
2005	Rejuvenasi Pancasila, Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia	Jurnal Novelty Vol.2, No.2
2006	Kebenaran produk-produk Hukum (Sebuah Tinjauan Epistemologis)	Jurnal Novelty Vol.3, No.1
2007	Aspek Filosofis dalam Penerapan dan Penegakan Hukum	Jurnal Novelty Vol.4, No.1
2009	Rasionalitas Pancasila sebagai dasar Pemahaman dan Pengembangan Pancasila	Jurnal Novelty No 1, Feb 2009

Pengalaman Penelitian :

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
1996	Makna Simbolis dalam Upacara Keagamaan Khitanan di Kraton Yogyakarta	Ketua peneliti	Kopertis V
1998	Perubahan Bentuk dan Pelaksanaan Gotong Royong pada masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Trimurti,Srandakan ,Bantul)	Ketua	APB UAD
1999	Birokratisasi Politik Orde Baru dalam Rekayasa Demokrasi Politik di Indonesia	Anggota	APB UAD
1999	Konsep Moral penguasa dalam Serat Nitipraja (Tinjauan Etika Politik)	Ketua	Kopertis V
2000	Implikasi Konsep Kekuasaan Jawa dalam Sistem Pemerintahan Orde baru	Ketua	Kopertis V

2001	Makna Nilai Ungkapan Tradisional Jawa bagi kehidupan Masyarakat Modern	Ketua	Kopertis V
2004	Makna Humanitas Instrumen gamelan Jawa	Ketua	Kopertis V
2006	Nilai Moral dalam Lingkup Akademik (Studi Kasus di UAD Yogyakarta)	Ketua	APB UAD
2007	Penelitian Dosen Muda, dengan judul, Tingkat Kesadaran Hukum Berlalulintas Masyarakat (Studi di masyarakat Kec,Galur, Kab,Kulon Progo, DIY)	Ketua	Dirjen Dikti Depdiknas
2008	Kontribusi Sejarah pergerakan Nasional dalam Menumbuhkan Jiwa nasionalisme Generasi Muda	Ketua	APB UAD
2009	Kebiasaan Akademik Mahasiswa FKIP UAD Yogyakarta, Ditinjau dari Perspektif Hedonisme	Ketua	APB UAD
2009	Model Pendidikan Moral Guru Sekolah dasar se-UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Lendah Tahun 2008	Ketua	APBD UAD
2010	Peningkatan Pemahaman Etika melalui Model Pembelajaran VCT di Prodi PPKn UAD Sem Gasal T.A 2009/2010	ketua	APB Kopertis V Yogyakarta